



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2024  
KECAMATAN GAMBUT  
KABUPATEN BANJAR**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2024 ini adalah merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2021 - 2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Gambut sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.



Gambut, 30 Januari 2025  
Camat Gambut

Ahmad Fauzan, S.STP, M.Si.  
NIP. 19801125 200012 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN .....	1
A.1 Maksud Laporan.....	1
A.2 Tujuan Laporan .....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI.....	1
B.1 TUGAS POKOK .....	1
B.2 FUNGSI .....	1
B.3 DASAR HUKUM .....	2
B.4 STRUKTUR ORGANISASI .....	3
B.5 KEPEGAWAIAN .....	4
C. ISU STRATEGIS.....	4
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	7
B. PERJANJIAN KINERJA .....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	13
A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2024 .....	13
A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.....	26
A.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA 2021-2026 .....	30
A.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET NASIONAL .....	33
A.5 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN .....	33
A.6 ANALISA EFISIENSI.....	45
A.7 ANALISA PROGRAM/KEGIATAN.....	47
A.8 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 .....	55
B. REALISASI ANGGARAN.....	64
BAB IV PENUTUP .....	80
A. KESIMPULAN .....	80
B. SARAN-SARAN .....	80
LAMPIRAN .....	82

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pegawai Kecamatan Gambut Tahun 2024.....	4
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gambut Tahun 2024.....	8
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2024.....	10
Tabel 3. 2 Skala Nilai Perangkat Kinerja .....	14
Tabel 3. 3 Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	15
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya .....	27
Tabel 3. 5 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Periode Akhir Renstra 2021-2026 .....	31
Tabel 3. 6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	45
Tabel 3. 7 Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat .....	57
Tabel 3. 8 Realisasi Jenis Belanja .....	65
Tabel 3. 9 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Gambut .....	65
Tabel 3. 10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 SOTK Kecamatan Gambut.....	3
Gambar 3. 1 Rapat Internal Tim AKIP .....	59
Gambar 3. 2 SOP Pengumpulan Data Kinerja .....	60
Gambar 3. 3 Tabel Pada Laporan Kinerja Triwulan II yang memuat target kinerja.....	60
Gambar 3. 4 Tabel Pada Laporan Kinerja Triwulan III yang memuat target kinerja.....	61
Gambar 3. 5 Rapat Evaluasi Internal Triwulan I .....	61
Gambar 3. 6 Rapat Evaluasi Internal Triwulan II .....	62
Gambar 3. 7 Rapat Evaluasi Internal Triwulan III .....	62
Gambar 3. 8 Rapat Penyampaian akan dilakukan perbaikan LkjIP Tahun 2024 .....	63
Gambar 3. 9 Notulen Rapat akan dilakukan perbaikan LkjIP Tahun 2024 .....	63
Gambar 3. 10 Rapat evaluasi internal menindaklanjuti LHE AKIP Tahun 2024.....	64
Gambar 3. 11 Notulen Rapat evaluasi internal menindaklanjuti LHE AKIP Tahun 2024.....	64

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar 2021 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2024 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap sasaran strategis Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tahun 2024 menunjukan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori **Berhasil** dengan capaian kinerja **96,67 (122,37%)**.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi

pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Gambut berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Gambut adalah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBD	Rp. 5.130.370.514,-	100%
APBP-P	Rp. 5.168.250.392,-	100,74%

### Laporan Realiasi Anggaran Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.636.890.934</b>	<b>6.030.477.405</b>	<b>90,86</b>	<b>6.407.828.686</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.233.604.434</b>	<b>5.523.431.405</b>	<b>90,17</b>	<b>5.766.103.983</b>
Belanja Pegawai	4.316.982.172	3.779.579.665	87,55	3.308.407.569
Belanja Barang dan Jasa	1.808.266.762	1.743.851.740	96,44	2.457.696.414
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>511.642.000</b>	<b>507.046.000</b>	<b>99,10</b>	<b>641.724.703</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.962.000	126.366.000	96,49	224.664.703
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	70.155.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	380.680.000	380.680.000	100	346.905.000
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(6.636.890.934)</b>	<b>(6.030.477.405)</b>	<b>90,86</b>	<b>(6.407.828.686)</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN**

#### **A.1 Maksud Laporan**

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Gambut;
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Gambut;
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan;
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

#### **A.2 Tujuan Laporan**

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Gambut kepada Bupati;
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Gambut;
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Gambut.

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**

#### **B.1 TUGAS POKOK**

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu *“Menangani Sebagian Unsur Otonomi Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Di Wilayah Kecamatan Tertentu”*.

#### **B.2 FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

### **B.3 DASAR HUKUM**

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

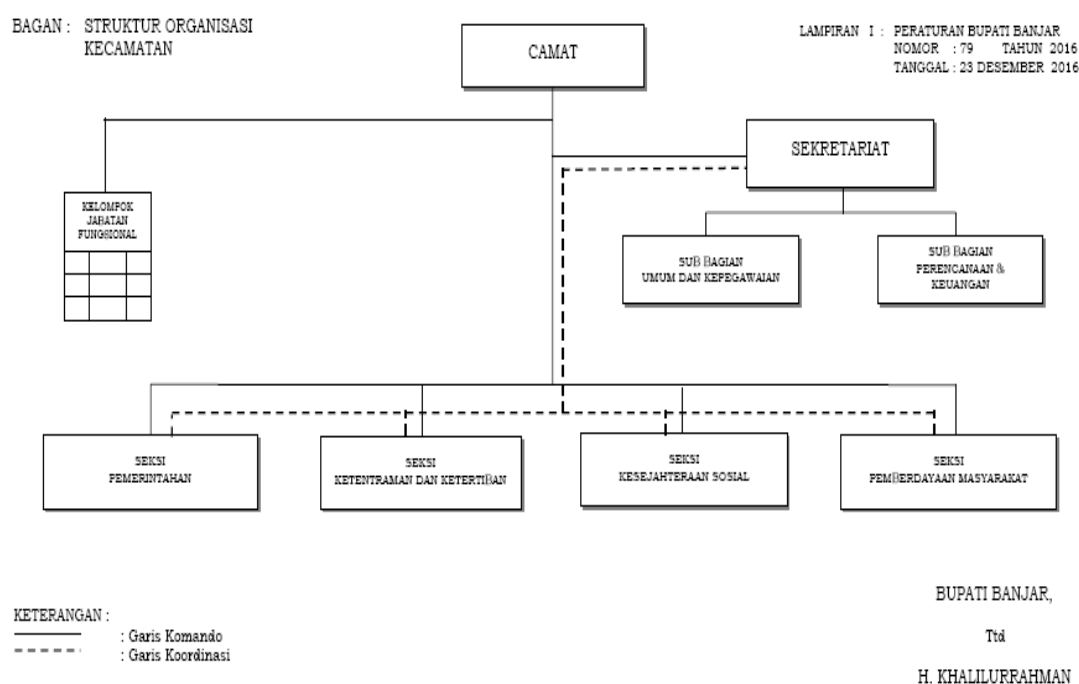
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan ; dan
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

#### B.4 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



Gambar 1. 1 SOTK Kecamatan Gambut

## B.5 KEPEGAWAIAN

Dalam menunjang tugas dan fungsi Kecamatan Gambut Tahun 2024, Kecamatan memiliki Sumberdaya Manusia atau kepegawaian sebanyak 13 orang ASN dan 6 orang Tenaga Honorer dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Pegawai Kecamatan Gambut Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	JENIS KELAMIN	PANGKAT/GOL
1	AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si	CAMAT	PNS	L	PEMBINA (IV/b)
2	RAMDANI, S.AP, M.A	SEKRETARIS CAMAT	PNS	L	PENATA TK. I (III/d)
3	HIDAYAT, S.Pd, M.Pd	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PNS	L	PEMBINA (IV/a)
4	ZURKANI, S.Sos	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	PNS	L	PENATA TK. I (III/d)
5	ERMA MAULIDA, S.Sos.I	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	PNS	P	PENATA TK. I (III/d)
6	YULIANTI, S.Kom, M.A	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PNS	P	PENATA (III/c)
7	JAKA UMBARA, S.Ak	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	PNS	L	PENATA MUDA TK.I (III/b)
8	RAKHMAT HIDAYAT	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PNS	L	PENATA MUDA (III/a)
9	HAIRUDIN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PNS	L	PENGATUR (II/c)
10	AHMAD HUSIN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PNS	L	PENGATUR (II/c)
11	MURSIDI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PNS	L	PENGATUR MUDA TK. I (II/b)
12	M. ARSYAD	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PNS	L	GOLONGAN IX
13	ERMILIA SUSANA, S.Si	PERENCANA AHLI PERTAMA	PPPK	P	-
14	BAHRUL HADI, S.Pd.I	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	TENAGA HONORER	L	-
15	MARIYA ULFAH, S.Sos.I	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	TENAGA HONORER	P	-
16	NURI FIRNIDA, S.AP	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	TENAGA HONORER	P	-
17	ALFIAN HIDAYAT, SM	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	TENAGA HONORER	L	-
18	MARIYANI	PRAMU KEBERSIHAN	TENAGA HONORER	P	-
19	MUHAMMAD HUSAINI	PETUGAS KEAMANAN	TENAGA HONORER	L	-

## C. ISU STRATEGIS

Kecamatan Gambut secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Gambut sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok Pelayanan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah. Isu strategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*Unresolved Matters*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Gambut adalah Pelaksanaan Pelayanan Paten masih belum maksimal.

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gambut Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

- **KATA PENGANTAR;**
- **DAFTAR ISI;**
- **RINGKASAN EKSEKUTIF;**

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

- **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), serta isu strategis organisasi;

- **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA**

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024.

- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024**

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2024 dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 beserta analisisnya

- **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. TUJUAN KECAMATAN GAMBUT

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun subkegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik”.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan definisi operasional sebagai berikut : **Indeks Kepuasan Masyarakat** adalah data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara. Formulasinya adalah  $(\text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \text{total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}$ . (Rujukan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat).

#### B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang

sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Gambut mengampu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Kecamatan Gambut mendukung pencapaian misi keempat Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

**“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah”**

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran masing-masing.

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gambut Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang  Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat  Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik / Sangat Tinggi)	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

Sumber : Surat Keputusan IKU Kecamatan Gambut Tahun 2024

## C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan



tahun 2024 meliputi sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.	79	Nilai		5,168,250,392	CAMAT
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	$IKKI = \sum (\text{Unsur kinerja utama} \times 40\%) + (\text{Unsur kepatuhan} \times 30\%) + (\text{Unsur Pelayanan Umum} \times 30\%)$	76	Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,812,447,392	SEKRETARIS CAMAT
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,871,100	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET
4	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,286,062,172	
5	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	21,000,000	
6	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	800,000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

7	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	200,648,000	
8	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29,976,000	
9	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180,232,320	
10	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89,857,800	
11	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	64,594,000	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
12	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	64,594,000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	63,364,000	
14	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	63,364,000	
15	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27,583,000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

16	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23,296,000	KASI PEMERINTAHAN
17	Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4,287,000	
18	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	182,320,000	
19	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	182,320,000	
20	Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17,942,000	
21	Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17,942,000	

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berupa data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten tahun 2024 adalah 86,67 dari target 86 atau tercapai 100,78%. Salah satu pendukung pencapaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Gambut. Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gambut dilakukan melalui pengisian kuesioner dari 180 responden. Berdasarkan survey tersebut pada Tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 94,04 Meningkat disbanding Tahun 2023 sebesar 94,30.

### B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2024

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100\%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100\%$$

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Gambut Kab. Banjar tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	<b>51</b> % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ <b>50</b> %	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 3. 2 Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	79	Nilai	96.67	122.37	Sangat Tinggi
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	76	Nilai	88.07	115.88	Sangat Tinggi
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
4	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	90.83	90.83	Tinggi
5	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
6	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
7	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
8	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
9	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
10	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi

11	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
12	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
14	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
16	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
17	Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
19	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
20	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
21	Terselenggaranya Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi



Penjelasan Tabel 3.2 sebagai berikut :

#### 1. SASARAN KINERJA MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN

Sasaran Kinerja Utama Kecamatan Gambut adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah instrumen penilaian yang dijadikan patokan untuk pengukuran kinerja kecamatan. Evaluasi Kinerja Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan, dimana didalamnya terdapat 7 (tujuh) aspek indikator Penilaian EKK, yaitu :

1. Aspek Administrasi;
2. Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
3. Aspek Pelayanan Publik;
4. Aspek Kesejahteraan Sosial;
5. Aspek Ketentraman dan Ketertiban;
6. Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan;
7. Aspek Pemberdayaan Masyarakat.

Formulasi perhitungan :

$$\text{Nilai EKK} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Pada sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang merupakan Sasaran Kecamatan Gambut Tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi dengan target 79 dapat terealisasi 96,67 dengan nilai capaian 127,37 % dengan predikat capaian **Sangat Tinggi**.

#### 2. SASARAN KINERJA TERSELENGGARANYA URUSAN PENYUSUNAN PROGRAM PERENCANAAN, KEUANGAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sasaran Kinerja Sekcam yaitu terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian dengan indikator Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut.

Penilaian mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan sistem pengendalian intern Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar.

Peraturan Bupati tentang Penilaian Mandiri Indikator dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah memuat Pedoman Implementasi Penilaian Mandiri IKKI Perangkat Daerah yang memuat metodologi penilaian mandiri IKKI Perangkat Daerah, termasuk pengaturan penilaiannya, yang dapat didukung dengan aplikasi Penilaian Mandiri IKKI Perangkat Daerah/*Control Self Assesment* (CSA).

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, Dimana didalamnya terdapat aspek indicator Penilaian Mandiri IKKI, yaitu :

1. Kinerja Utama;
2. Kepatuhan;
3. Kinerja Pelayanan Publik

Formulasi Perhitungan:

$$IKKI = \sum (Unsur\ Kinerja\ Utama \times 40\%) + (Unsur\ Kepatuhan \times 30\%) + (Unsur\ Pelayanan\ Umum \times 30\%)$$

Pada sasaran Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian yang merupakan Sasaran Sekretaris Camat Tahun 2024 dengan Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) dengan target 76 dapat terealisasi 88,07 dengan nilai capaian 115,88 % dengan predikat capaian **Sangat Tinggi**.

### 3. SASARAN KINERJA KASUBBAG PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG BERKUALITAS

Sasaran Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas memiliki indikator Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu dengan target pada Tahun 2024 yaitu 100 % dapat terealisasi 100 % dengan nilai capaian 100% dan capaian predikat **Sangat Tinggi**. Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum Realisasi\ capaian\ indikator\ sub\ kegiatan\ (a, b, c, d, e\ dan\ f)}{\sum Target\ Capaian\ Indikator\ sub\ kegiatan\ (a, b, c, d, e\ dan\ f)} \times 100\%$$

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD;

- c. Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD;
- d. Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
- e. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
- f. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

#### 4. SASARAN KINERJA PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran Kinerja Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah yang berkualitas memiliki indikator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target Tahun 2024 yaitu 100 % dapat terealisasi 90,83 % dan capaian predikat **Tinggi**. Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum \text{Realisasi capaian indikator sub kegiatan (a, b, c)}}{\sum \text{Target Capaian Indikator sub kegiatan(a, b, c)}} \times 100\%$$

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- a. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; dan
- c. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

#### 5. SASARAN KINERJA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERANGKAT DAERAH YANG BERKUALITAS

Sasaran Kinerja Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas memiliki indikator Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target pada Tahun 2024 yaitu 100 % dapat terealisasi 100 % sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum \text{Realisasi capaian indikator Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD}}{\sum \text{Target Capaian Indikator Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD}} \times 100\%$$

## 6. SASARAN KINERJA LANCARNYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH

Sasaran Kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah memiliki indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi dengan target pada Tahun 2024 yaitu 100% dapat terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum \text{Realisasi capaian indikator Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai}}{\sum \text{Target Capaian Indikator Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai}} \times 100\%$$

## 7. SASARAN KINERJA TERSELENGGARANYA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM KANTOR

Sasaran Kinerja Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Kantor memiliki indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target Tahun 2024 yaitu 100% dapat terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum \text{Realisasi capaian indikator sub kegiatan (a, b, c, d, e, f, g dan h)}}{\sum \text{Target Capaian Indikator sub kegiatan (a, b, c, d, e, f, g dan h)}} \times 100\%$$

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
- Tersedianya Peralatan Rumah Tangga;
- Tersedianya Logistik Kantor;
- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor;
- Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu;
- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
- Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

## 8. SASARAN KINERJA TERSEDINYA SARANA DAN PRASARANA

Sasaran Kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan memiliki indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target Tahun 2024 yaitu 100% dapat terealisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja Tersedianya

Peralatan dan Mesin Lainnya. Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum \text{Realisasi capaian indikator Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya}}{\sum \text{Target Capaian Indikator Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya}} \times 100\%$$

#### 9. SASARAN KINERJA TERSELENGGARANYA JASA PENUNJANG PELAYANAN UMUM KANTOR

Sasaran Kinerja Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor memiliki indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Tahun 2024 yaitu 100% dapat terealisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum \text{Realisasi capaian indikator sub kegiatan (a, b dan c)}}{\sum \text{Target Capaian Indikator sub kegiatan (a, b dan c)}} \times 100\%$$

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

#### 10. SASARAN KINERJA TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

Sasaran Kinerja Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan memiliki indikator Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Tahun 2024 yaitu 100% dapat terealisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum \text{Realisasi capaian indikator sub kegiatan (a, b dan c)}}{\sum \text{Target Capaian Indikator sub kegiatan (a, b dan c)}} \times 100\%$$

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
- Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

11. SASARAN KINERJA MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN, PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEBENCANAAN KECAMATAN SOSIAL

Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan. memiliki indikator Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum \text{Realisasi capaian Kegiatan Terlaksananya urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat}}{\sum \text{Target Capaian Kegiatan Terlaksananya urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat}} \times 100\%$$

12. SASARAN KINERJA TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT

Sasaran Kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat memiliki indikator Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum \text{Realisasi capaian Sub Kegiatan Terlaksananya urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan}}{\sum \text{Target Capaian Sub Kegiatan Terlaksananya urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan}} \times 100\%$$

13. SASARAN KINERJA MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN

Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan memiliki indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan target Tahun 2024 yaitu 100% dan terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum \text{Realisasi capaian indikator Kegiatan Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa}}{\sum \text{Target Capaian Indikator Kegiatan Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa}} \times 100\%$$

#### 14. SASARAN KINERJA TERSELENGGARANYA KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA

Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa memiliki indikator Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana dengan target Tahun 2024 yaitu 100% dan terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum \text{Realisasi capaian indikator Sub Kegiatan (a dan b)}}{\sum \text{Target Capaian Indikator Kegiatan (a dan b)}} \times 100\%$$

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

#### 15. SASARAN KINERJA MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan memiliki indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan dengan target Tahun 2024 yaitu 100 % dan terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum \text{Realisasi capaian indikator Kegiatan (a dan b)}}{\sum \text{Target Capaian Indikator Kegiatan (a dan b)}} \times 100\%$$

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- b. Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.

#### 16. SASARAN KINERJA TERSELENGGARANYA KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki indikator Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target Tahun 2024 yaitu 100 % dan terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan

predikat **Sangat Tinggi**. Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum \text{Realisasi capaian indikator Sub Kegiatan (a dan b)}}{\sum \text{Target Capaian Indikator Sub Kegiatan (a dan b)}} \times 100\%$$

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan; dan
- b. Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat.

#### 17. SASARAN KINERJA PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Sasaran Kinerja Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah memiliki indikator Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan target Tahun 2024 yaitu 100 % dan terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum \text{Realisasi capaian Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah}}{\sum \text{Target Capaian Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah}} \times 100\%$$

#### 18. SASARAN KINERJA MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memiliki indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target Tahun 2024 yaitu 100 % dan terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum \text{Realisasi capaian indikator Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah}}{\sum \text{Target Capaian Indikator Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah}} \times 100\%$$

#### 19. SASARAN KINERJA TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH

Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah memiliki indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana dengan target Tahun 2024 yaitu



100 % dan terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum \text{Realisasi capaian indikator Sub Kegiatan (a, b dan c)}}{\sum \text{Target Capaian Indikator Sub Kegiatan (a, b dan c)}} \times 100\%$$

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal; dan
- c. Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan.

#### 20. SASARAN KINERJA MENINGKATNYA FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan memiliki indikator Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target Tahun 2024 yaitu 100 % dan terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum \text{Realisasi capaian indikator terselenggaranya kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa}}{\sum \text{Target Capaian Indikator terselenggaranya kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa}} \times 100\%$$

#### 21. SASARAN KINERJA TERSELENGGARANYA KEGIATAN FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Sasaran Kinerja Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa memiliki indikator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target Tahun 2024 yaitu 100 % dan terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Adapun formulasi perhitungan capaian indikator sasaran yaitu :

$$\frac{\sum \text{Realisasi capaian indikator sub kegiatan (a, b, c, d dan e)}}{\sum \text{Target Capaian Indikator sub kegiatan (a, b, c, d dan e)}} \times 100\%$$

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
- b. Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, Dan Pendayagunaan Ruang Desa; dan
- e. Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

## A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Kertak Gambut sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Kedua Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

1	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		TAHUN 2023		TAHUN 2022		KET
				REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	96.67	122.37	77.36	105.97	76.82	109.74	
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Nilai	88.07	115.88	73.24	100.57	22.60	45.20	
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100	100.00	100	100.00	100	100.00	
4	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100.00	100	100.00	100	100.00	
5	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100.00	100	100.00	100	100.00	
6	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persen	100	100.00	100	100.00	100	100.00	
7	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100.00	100	100.00	252	100.00	

8	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100.00	100	100.00	100	100.00	
9	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100.00	100	100.00	100	100.00	
10	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100.00	100	100.00	100	100.00	
11	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persen	100	100.00	100	100.00	100	100.00	
12	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	100.00	100	100.00	100	100.00	
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	100.00	100	100.00	100	85.71	
14	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	Persen	100	100.00	4	100.00			
15	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	100.00	100	100.00	100	100.00	

16	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100.00	1	100.00	4	100.00	
17	Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	1	1.00	-	-	2	100.00	
18	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100.00	350	100.00	1	100.00	
19	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi	Persen	100	100.00	1	100.00	2	100.00	
20	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100.00	100	100.00	100	100.00	
21	Terselenggaranya Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100.00	100	100.00	100	100.00	

Sumber : Renstra Perubahan Kedua Kecamatan Gambut Tahun 2021-2026

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas tentang Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Gambut menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan. Capaian indikator kinerja sasaran strategis Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan terealisasi pada tahun 2023 diperoleh nilai realisasi sebesar 77,36 dengan target sebesar 73 dan pada tahun 2022 diperoleh nilai 76,82 dengan target sebesar 70. Maka, dibandingkan dengan Tahun 2024 Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan meningkat tinggi dengan perolehan nilai sebesar 96,67 dengan target 79. Hal ini disebabkan meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Gambut.

### A.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA 2021-2026

Indikator kinerja sasaran Tahun 2024 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Kedua Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Kedua Renstra, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Gambut selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Periode Akhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Periode Akhir Renstra 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	96.67	85	87.93
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Nilai	88.07	82	93.11
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100	100	100.00
4	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100.00
5	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100.00
6	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persen	100	100	100.00
7	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100.00
8	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100.00
9	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100.00
10	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100.00
11	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persen	100	100	100.00
12	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	100	100.00

13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	100	100.00
14	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	Persen	100	100	100.00
15	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	100	100.00
16	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100.00
17	Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100	100.00
18	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100.00
19	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persen	100	100	100.00
20	Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100.00
21	Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100.00



Berdasarkan data pada tabel 3.4 tentang Realisasi Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Periode Akhir Renstra menunjukkan bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Gambut dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan terealisasi sebesar 96,67 telah melampaui target di akhir periode Renstra yaitu 85 dengan capaian 87,93%.

#### A.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET NASIONAL

Merupakan capaian kinerja yang membandingkan dengan kinerja yang ditargetkan nasional, untuk mengukur keberhasilan daerah dengan standar Nasional. Tentang Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tidak bisa di sandingkan dengan Target Provinsi Dan Nasional seperti tabel di atas mengingat belum diperolehnya data yang akurat dan kredible mengenai target Provinsi maupun Nasional tersebut.

#### A.5 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Pada Tahun 2024 berdasarkan Renstra Perubahan Kedua Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Sasaran Strategis Kecamatan Gambut yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan beberapa sasaran kinerja lainnya guna mendukung sasaran strategis Kecamatan Gambut.

##### 1. MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN

Dalam Upaya pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2024 yang telah berhasil memperoleh nilai 96,67 dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi:

##### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Peran penting dari Masyarakat/ desa yang berperan dalam memberikan informasi dan data dukung di saat Kecamatan Gambut melakukan pengumpulan data yang diminta oleh tim penilai kabupaten. Hal ini menjadikan pelaksanaan penilaian Sasaran Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja baik program, kegiatan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencapaian kinerja secara keseluruhan yang harus dilakukan agar bisa mengetahui perkembangan pelaksanaan kinerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan solusi.

### **Faktor Penghambat Sasaran**

Faktor penghambat tercapainya sasaran adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Gambut
2. Kualitas data dukung penilaian yang tidak sesuai kriteria tim penilai.
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi, karena masih terdapat pegawai yang belum bisa menguasai komputer.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pencapaian kinerja

### **Upaya Perbaikan**

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kinerja ASN.
2. Monitoring dan evaluasi bulanan juga diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan kinerja.

### **2. TERSELENGGARANYA URUSAN PENYUSUNAN PROGRAM, PERENCANAAN, KEUANGAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja terselenggaranya urusan penyusunan program, perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) dengan perolehan capaian 88,07 dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Koordinasi yang baik dalam Tim sehingga meningkatnya Nilai IKKI
2. Kelengkapan administrasi baik di perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian;
3. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian; serta
4. Komitmen Pimpinan dalam Pencapaian Nilai IKKI.

### **Faktor Penghambat Sasaran**

1. Terlambatnya melaksanakan/mengatur jadwal pemenuhan data IKKI

2. Adanya beberapa dokumen yang tidak terpenuhi dikarenakan belum dilakukan oleh SKPD.

#### **Upaya Perbaikan**

1. Penyusunan jadwal rapat koordinasi pemenuhan data IKKI agar dilaksanakan pada bulan Juli.
2. Melaksanakan kegiatan/membuat dokumen yang belum terpenuhi di tahun sebelumnya.

### **3. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG BERKUALITAS**

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi:

#### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Adanya penambahan SDM pada sub bagian Perencanaan;
2. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dalam penyusunan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja; dan
3. Koordinasi yang baik dengan Bappedalitbang dan BPKPAD.

#### **Faktor Penghambat Sasaran**

1. Kurangnya informasi terkait keselarasan indikator kinerja pada saat penyusunan dokumen Renja Perubahan dengan Renstra Perubahan Kedua;
2. Penyesuaian standar harga dalam penyusunan RKA; dan
3. Sulitnya mengatur jadwal rapat koordinasi dengan para seksi dalam rangka pembahasan dokumen perencanaan maupun sasaran kinerja.

#### **Upaya Perbaikan**

1. Melakukan koordinasi secara intensif ke Bappedalitbang dan BPKPAD baik via *whatsapp* maupun secara langsung;
2. Meminta dukungan dari Pimpinan dalam penjadwalan rapat koordinasi.

#### 4. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH YANG BERKUALITAS

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan perolehan capaian 90,83% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

##### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penatausahaan keuangan;
2. Adanya SDM yang memadai di bag keuangan; dan
3. Koordinasi dan kerjasama yang baik di bag keuangan.

##### **Faktor Penghambat Sasaran**

1. Adanya 1 (satu) sasaran kinerja yang tidak tercapai targetnya.

##### **Upaya Perbaikan**

1. Akan dilakukan perbaikan target pada reuiu Renstra

#### 5. PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERANGKAT DAERAH YANG BERKUALITAS

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

##### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan BPKPAD dalam pengelolaan BMD; dan
2. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar pegawai dalam pengelolaan BMD.

##### **Faktor Penghambat Sasaran**

1. Kurangnya SDM di bagian aset

##### **Upaya Perbaikan**

1. Melakukan koordinasi yang baik dengan subbag dan tiap seksi dalam pengelolaan BMD.

## 6. LANCARNYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Tersedianya anggaran dalam menunjang kegiatan; dan
2. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan.

### **Faktor Penghambat Sasaran**

1. Kurangnya SDM dalam menunjang kegiatan Kepegawaian

### **Upaya Perbaikan**

1. Melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh ASN

## 7. TERSELENGGARANYA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM KANTOR

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Kantor dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Kegiatan bersifat rutin sehingga sudah dijadwalkan kegiatan pengelolaan; dan
2. Tersedianya anggaran dalam menunjang kegiatan.

### **Faktor Penghambat Sasaran**

1. Beberapa keperluan kantor guna menunjang kegiatan tidak termuat dalam DPA;
2. Kerusakan sarana dan prasarana yang tidak dapat diprediksi; dan
3. Aplikasi SRIKANDI yang sering mengalami gangguan.

### **Upaya Perbaikan**

1. Membuat daftar keperluan kantor yang tidak termuat di DPA; dan
2. Membuat buku surat masuk-keluar mengantisipasi gangguan pada Aplikasi SRIKANDI

## 8. TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

Mudahnya koordinasi dengan penyedia untuk pemenuhan pengadaan

### **Faktor Penghambat Sasaran**

Mencari unit yang sesuai spek

### **Upaya Perbaikan**

Aktif berkomunikasi dengan penyedia

## 9. TERSELENGGARANYA JASA PENUNJANG PELAYANAN UMUM KANTOR

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Kegiatan pembayaran Listrik dan air yang bersifat rutin sehingga sudah terjadwal;
2. Adanya SDM yang mengelola administrasi surat menyurat; dan
3. Tersedianya anggaran dalam kegiatan penunjang pelayanan umum kantor.

### **Faktor Penghambat Sasaran**

1. Adanya perubahan tarif Listrik/air;
2. Aplikasi SRIKANDI yang mengalami gangguan sehingga mengganggu administrasi surat menyurat

### **Upaya Perbaikan**

1. Menjalin koordinasi yang baik dengan staf dan pegawai yang lain; serta
2. Memberikan saran/alternatif/masukan kepada rekan kerja yang mengalami kesulitan ketika Aplikasi SRIKANDI gangguan.

#### 10. TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

##### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

Kurangnya SDM dalam menunjang kegiatan di Sub Bagian Umum, terutama dalam hal menunjang pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

##### **Faktor Penghambat Sasaran**

Mudahnya dalam mencari rekanan dalam proses pengadaan

##### **Upaya Perbaikan**

Menjalin koordinasi yang baik antar seksi/subbag dalam pemeliharaan sarana dan prasarana

#### 11. MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN, PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEBENCANAAN KECAMATAN

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan dengan indikator Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

##### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Koordinasi yang terjalin baik antar seksi;
2. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan

##### **Faktor Penghambat Sasaran**

1. Jangka waktu dari mendapat informasi jadwal kegiatan ke pelaksanaan kegiatan yang terlalu pendek

##### **Upaya Perbaikan**

Menyusun jadwal kegiatan dengan berkoordinasi dengan lintas SKPD dengan baik.

## 12. TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Koordinasi yang baik antar seksi;
2. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; dan
3. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan

### **Faktor Penghambat Sasaran**

1. Terbatasnya jumlah pegawai yang kompeten untuk menangani tugas-tugas tambahan yang dilimpahkan kepada Camat; dan
2. Jangka waktu dari mendapat informasi jadwal kegiatan ke pelaksanaan kegiatan yang terlalu pendek.

### **Upaya Perbaikan**

1. Pengusulan ke BKDPSDM untuk penambahan pegawai di Kecamatan;
2. Menyusun jadwal kegiatan dengan berkoordinasi dengan lintas SKPD dengan baik

## 13. MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Koordinasi yang baik antar pihak sehingga komunikasi terjalin dengan baik;
2. Kader PKK Desa dan Kelurahan ikut berpartisipasi;
3. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; dan
4. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan

### **Faktor Penghambat Sasaran**

1. Informasi Pelaksanaan Penyelenggara mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan pemberdayaan agar tidak bersamaan dengan kegiatan lain.



### **Upaya Perbaikan**

Menyusun jadwal kegiatan dengan berkoordinasi dengan lintas SKPD dengan baik.

#### **14. TERSELENGGARANYA KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

##### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Koordinasi yang baik antar pihak sehingga komunikasi terjalin dengan baik;
2. Kader PKK Desa dan Kelurahan ikut berpartisipasi;
3. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; dan
4. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan

##### **Faktor Penghambat Sasaran**

1. Informasi Pelaksanaan Penyelenggara mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan pemberdayaan agar tidak bersamaan dengan kegiatan lain.

### **Upaya Perbaikan**

Menyusun jadwal kegiatan dengan berkoordinasi dengan lintas SKPD dengan baik.

#### **15. MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN**

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

##### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor di wilayah;
2. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; dan
3. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan

### **Faktor Penghambat Sasaran**

1. Peserta rapat yang terlambat hadir.

### **Upaya Perbaikan**

Melakukan *follow up* kembali ke peserta rapat 1 (satu) hari sebelum acara dimulai.

## **16. TERSELENGGARANYA KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor di wilayah;
2. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; dan
3. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan

### **Faktor Penghambat Sasaran**

1. Peserta rapat yang terlambat hadir.

### **Upaya Perbaikan**

Melakukan *follow up* kembali ke peserta rapat 1 (satu) hari sebelum acara dimulai.

## **17. PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH**

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Jumlah Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor di wilayah;
2. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; dan
3. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan

### **Faktor Penghambat Sasaran**

1. Peserta rapat yang terlambat hadir.

### **Upaya Perbaikan**

Melakukan *follow up* kembali ke peserta rapat 1 (satu) hari sebelum acara dimulai.

## **18. MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor di wilayah;
2. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; dan
3. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan

### **Faktor Penghambat Sasaran**

1. Peserta rapat yang terlambat hadir.

### **Upaya Perbaikan**

Melakukan *follow up* kembali ke peserta rapat 1 (satu) hari sebelum acara dimulai.

## **19. TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor di wilayah;
2. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; dan
3. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan

### **Faktor Penghambat Sasaran**

1. Peserta rapat yang terlambat hadir.

### Upaya Perbaikan

Melakukan *follow up* kembali ke peserta rapat 1 (satu) hari sebelum acara dimulai.

#### 20. MENINGKATNYA FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan dengan indikator Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

##### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor di wilayah;
2. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan;
3. Seluruh panitia terlibat saat pelaksanaan

##### **Faktor Penghambat Sasaran**

1. Peserta rapat yang terlambat hadir.

### Upaya Perbaikan

Melakukan *follow up* kembali ke peserta rapat 1 (satu) hari sebelum acara dimulai.

#### 21. TERSELENGGARANYA KEGIATAN FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

##### **Faktor Keberhasilan Sasaran**

1. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor di wilayah;
2. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan;
3. Seluruh panitia terlibat saat pelaksanaan

##### **Faktor Penghambat Sasaran**

1. Peserta rapat yang terlambat hadir.

## Upaya Perbaikan

Melakukan *follow up* kembali ke peserta rapat 1 (satu) hari sebelum acara dimulai.

### A.6 ANALISA EFISIENSI

Tabel 3. 5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA ( $\geq 100$ %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	122.37	89.05	10.95
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	115.88	88.46	11.54
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100.00	94.5	5.50
4	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00	87.46	12.54
5	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.00	100	0.00
6	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100.00	98.75	1.25
7	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00	97.67	2.33
8	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	97.08	2.92
9	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	96.25	3.75
10	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	93.74	6.26

11	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100.00	93.68	6.32
12	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	93.68	6.32
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100.00	98.01	1.99
14	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100.00	97.04	2.96
15	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100.00	99.54	0.46
16	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.00	99.99	0.01
17	Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.00	96.10	3.90
18	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00	98.57	1.43
19	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100.00	96.00	4.00
20	Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.00	97.43	2.57
21	Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.00	97.43	2.57

Bedasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan secara persentase capaian kinerja mencapai 122,37% dan persentase penyerapan anggaran mencapai 89,05%. Sehingga diperoleh tingkat efisiensi sumber daya yang digunakan dan efisiensi

anggaran sebesar 72,77%. Efisiensi ini diperoleh karena didukung oleh program-program yang dilaksanakan pada Kecamatan Gambut.

Banyaknya kegiatan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

#### A.7 ANALISA PROGRAM/KEGIATAN

Dalam pencapaian target sasaran kinerja ada program dan kegiatan yang mendukung. Adapun beberapa faktor keberhasilan dan kegagalan diantaranya yaitu :

##### 1. MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN

Dalam pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan didukung oleh 6 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

##### **Faktor Keberhasilan**

1. Peran penting dari Masyarakat/ desa yang berperan dalam memberikan informasi dan data dukung di saat Kecamatan Gambut melakukan pengumpulan data yang diminta oleh tim penilai kabupaten. Hal ini menjadikan pelaksanaan penilaian Sasaran Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan;
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja baik program, kegiatan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencapaian kinerja secara keseluruhan yang harus dilakukan agar bisa mengetahui perkembangan pelaksanaan kinerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan Solusi.

## 2. TERSELENGGARANYA URUSAN PENYUSUNAN PROGRAM PERENCANAAN, KEUANGAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat
2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### **Faktor Keberhasilan**

1. Koordinasi yang baik dalam Tim sehingga meningkatnya Nilai IKKI
2. Kelengkapan administrasi baik di perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian;
3. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian; serta
4. Komitmen Pimpinan dalam Pencapaian Nilai IKKI.

## 3. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG BERKUALITAS

Dalam pencapaian sasaran kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas didukung oleh 6 sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### **Faktor Keberhasilan**

1. Adanya penambahan SDM pada sub bagian Perencanaan;



2. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dalam penyusunan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja; dan
3. Koordinasi yang baik dengan Bappedalitbang dan BPKPAD.

#### 4. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH YANG BERKUALITAS

Dalam pencapaian sasaran kinerja Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah yang berkualitas didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Bverifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

##### **Faktor Keberhasilan**

1. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penatausahaan keuangan;
2. Adanya SDM yang memadai di bag keuangan; dan
3. Koordinasi dan kerjasama yang baik di bag keuangan

#### 5. PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERANGKAT DAERAH YANG BERKUALITAS

Dalam pencapaian sasaran kinerja Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas didukung oleh sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

##### **Faktor Keberhasilan**

1. Terjalannya koordinasi yang baik dengan BPKPAD dalam pengelolaan BMD; dan
2. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar pegawai dalam pengelolaan BMD.

#### 6. LANCARNYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH

Dalam pencapaian sasaran kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah didukung oleh sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

##### **Faktor Keberhasilan**

1. Tersedianya anggaran dalam menunjang kegiatan; dan
2. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan

## 7. TERSELENGGARANYA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM KANTOR

Dalam pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Kantor didukung oleh 8 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Fasilitas Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

### **Faktor Keberhasilan**

1. Kegiatan bersifat rutin sehingga sudah dijadwalkan kegiatan pengelolaan; dan
2. Tersedianya anggaran dalam menunjang kegiatan.

## 8. TERSEDINYA SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

Dalam pencapaian sasaran kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan didukung oleh sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

### **Faktor Keberhasilan**

1. Mudahnya koordinasi dengan pejabat pengadaan dan penyedia;
2. Tersedianya spesifikasi peralatan dan mesin sesuai kebutuhan.

## 9. TERSELENGGARANYA JASA PENUNJANG PELAYANAN UMUM KANTOR

Dalam pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### **Faktor Keberhasilan**

1. Kegiatan pembayaran Listrik dan air yang bersifat rutin sehingga sudah terjadwal;

2. Adanya SDM yang mengelola administrasi surat menyurat; dan
3. Tersedianya anggaran dalam kegiatan penunjang pelayanan umum kantor.

#### 10. TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

Dalam pencapaian sasaran kinerja Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

##### **Faktor Keberhasilan**

1. Adanya alokasi anggaran khusus untuk pemeliharaan
2. Mudah nya menemukan rekanan jasa perbaikan/service

#### 11. MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN, PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEBENCANAAN KECAMATAN

Dalam pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan kepada Camat.

##### **Faktor Keberhasilan**

1. Koordinasi yang terjalin baik antar seksi;
2. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan

#### 12. TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT

Dalam pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat didukung oleh sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

##### **Faktor Keberhasilan**

1. Koordinasi yang baik antar seksi;
2. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; dan
3. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan

### 13. MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN

Dalam pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan didukung oleh Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa.

#### **Faktor Keberhasilan**

1. Koordinasi yang baik antar pihak sehingga komunikasi terjalin dengan baik;
2. Kader PKK Desa dan Kelurahan ikut berpartisipasi;
3. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; dan
4. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan

### 14. TERSELENGGARANYA KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA

Dalam pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa didukung oleh 2 sub Kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

#### **Faktor Keberhasilan**

1. Koordinasi yang baik antar pihak sehingga komunikasi terjalin dengan baik;
2. Kader PKK Desa dan Kelurahan ikut berpartisipasi;
3. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; dan
4. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan

### 15. MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN

Dalam pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum didukung oleh 2 Kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

#### **Faktor Keberhasilan**

1. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor di wilayah;

2. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; dan
3. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan

#### 16. TERSELENGGARANYA KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dalam pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum didukung oleh 2 sub Kegiatan yaitu :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh

##### **Faktor Keberhasilan**

1. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor di wilayah;
2. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; dan
3. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan.

#### 17. PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Dalam pencapaian sasaran kinerja Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah didukung oleh sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

##### **Faktor Keberhasilan**

1. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor di wilayah;
2. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; dan
3. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan.

#### 18. MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Dalam pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

##### **Faktor Keberhasilan**

1. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor di wilayah;
2. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; dan
3. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan

#### 19. TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH

Dalam pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu :

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

##### **Faktor Keberhasilan**

1. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor di wilayah;
2. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; dan
3. Dukungan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan

#### 20. MENINGKATNYA FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

Dalam pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan didukung oleh kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

##### **Faktor Keberhasilan**

1. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor di wilayah;
2. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan;
3. Seluruh panitia terlibat saat pelaksanaan.

#### 21. TERSELENGGARANYA KEGIATAN FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dalam pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa didukung oleh 6 sub kegiatan yaitu :

1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3. Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
5. Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
6. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

#### **Faktor Keberhasilan**

1. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor di wilayah;
2. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan;
3. Seluruh panitia terlibat saat pelaksanaan.

### **A.8 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT LAPORAN KINERJA TAHUN 2024**

#### **EVALUASI KINERJA TAHUN 2024**

Berdasarkan Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2024 dengan Nomor 700.1.2/102/LHE/P.Kin.As/II/ITDA tanggal 28 Juni 2024 memperoleh nilai 79,56 dengan interpretasi predikat BB ( Sangat Baik ). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen yang di evaluasi. Dari hasil evaluasi AKIP Tahun 2024, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut :

##### **1) Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 23,62 dari nilai maksimal 30. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar telah memuat tujuan, sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka menengah serta target tahunan. Selain kondisi tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut:

- a) Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Gambut berupa Rencana aksi belum menggambarkan perencanaan aktivitas staf yang mendukung kinerja;

- b) Rencana aksi belum menjabarkan Perjanjian Kinerja yang memuat aktifitas yang mendukung kinerja.

## 2) Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 23,00 dari nilai maksimal 30. Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar telah menyepakati Perjanjian Kinerja sebagai ukuran kinerja secara formal dan menyusun laporan kinerja, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a) Pada SOP belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
- b) Data kinerja yang dikumpulkan belum terdapat pembagian target triwulanan untuk mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- c) Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit secara berjenjang.

## 3) Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 13,07 dari nilai maksimal 15. Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) namun masih terdapat beberapa yang perlu menjadi perhatian, yaitu : Laporan Kinerja Kecamatan Gambut telah memuat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan namun belum terdapat analisis dan perhitungan capaian kinerja.

## 4) Evaluasi Internal

Hasil evaluasi atas Evaluasi Internal Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 19,87 dari nilai maksimal 25. Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar telah melaksanakan Evaluasi Kinerja, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai dan belum seluruh rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.



## REKOMENDASI

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka direkomendasikan kepada Camat Gambut Kabupaten Banjar beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Menyusun Perencanaan Kinerja berupa Rencana Aksi yang menggambarkan perencanaan aktivitas staf yang mendukung kinerja serta Rencana Aksi merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja;
2. Menyusun dan menetapkan SOP Pengukuran Kinerja yang memuat mekanisme yang jelas proses pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
3. Membuat data kinerja yang termuat target triwulanan untuk mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
4. Melakukan pemantauan capaian kinerja sampai pada jenjang operasional staf/pelaksana;
5. Menyusun LkjlP secara lengkap dengan menyajikan informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan, memuat dan menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja outcome/output penting, menyajikan data perbandingan yang lengkap serta menyajikan data kinerja yang andal;
6. Melaksanakan evaluasi internal secara berkala dan mendalam serta melaksanakan pembahasan dengan pihak yang berkepentingan serta memuat kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi. Kesepakatan tersebut secara formal menjelaskan tentang siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti.

## TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Kecamatan Gambut telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi	Waktu Pelaksanaan
1	Menyusun Perencanaan Kinerja berupa Rencana Aksi yang menggambarkan Perencanaan Aktivitas Staf yang mendukung kinerja serta Rencana Aksi merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja	Dokumen Rencana Aksi akan dijabarkan hingga level staf/pelaksana	Tahun 2024

2	Menyusun dan Menetapkan SOP Pengukuran Kinerja yang memuat mekanisme yang jelas proses pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	Membuat SOP Pengukuran Kinerja yang memuat mekanisme proses pengumpulan data kinerja yang jelas	Tahun 2024
3	Membuat data kinerja yang memuat target triwulanan untuk mendukung capaian kinerja yang diharapkan	Laporan Kinerja Triwulanan telah disusun dengan memuat target dan capaian kinerja dari pejabat sampai dengan staf/pelaksana	Tahun 2024
4	Melakukan pemantauan capaian kinerja sampai pada jenjang operasional staf/pelaksana;	Melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi hingga jenjang staf/pelaksana	Tahun 2024
5	Menyusun LKJiP secara lengkap dengan menyajikan informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan, memuat dan menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja <i>outcome/output</i> penting, menyajikan data perbandingan yang lengkap serta menyajikan data kinerja yang andal	Dokumen LKJiP untuk tahun berikutnya akan disusun sesuai dengan rekomendasi. Dimana dokumen tersebut akan menyajikan informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan, memuat dan menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja <i>outcome/output</i> penting, menyajikan data perbandingan yang lengkap serta menyajikan data kinerja yang andal	Tahun 2025
6	Melaksanakan evaluasi internal secara berkala dan mendalam serta melaksanakan pembahasan dengan pihak yang berkepentingan serta memuat kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi. Kesepakatan tersebut secara formal menjelaskan tentang siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti	Akan dilakukan rapat internal bersama Tim AKIP terhadap hasil evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi	Tahun 2024

## LAPORAN TINDAK LANJUT


- Menyusun Perencanaan Kinerja berupa Rencana Aksi yang menggambarkan Perencanaan Aktivitas Staf yang mendukung kinerja serta Rencana Aksi merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja;
  - Telah dilakukan pembahasan di rapat evaluasi internal bersama Tim AKIP untuk penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025, akan dibuat penyesuaian rencana aksi sampai level staf
  - Dokumentasi Kegiatan

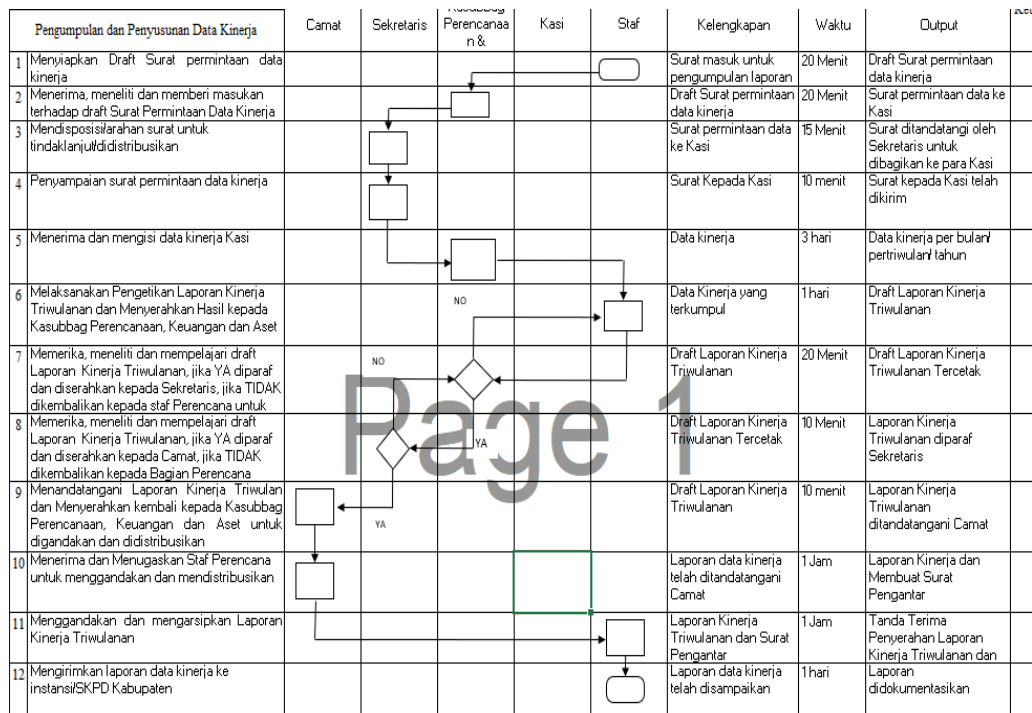


Gambar 3. 1 Rapat Internal Tim AKIP

2. Menyusun dan Menetapkan SOP Pengukuran Kinerja yang memuat mekanisme yang jelas proses pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;

- SOP pengumpulan kinerja proses sedang dalam proses penetapan
- Dokumentasi Kegiatan

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR</b> <b>KECAMATAN GAMBUT</b>		Nomor SOP				
			Tgl. Pembuatan				
			Tgl. Revisi				
			Tgl. Pengesahan				
			Disahkan Oleh	Camat Gambut			
			Nama SOP	Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja			
Dasar Hukum			Pengendalian				
1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP			1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait				
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah			2. Memahami sasaran dan capaian program				
3. Peraturan Bupati Banjar No. 51 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar			3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer				
4.							
Keterkaitan			Peralatan/Perlengkapan				
- Lintas Sekretariat dalam Lingkungan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar			1. Alat tulis/cetak				
- Bappeda Kabupaten Banjar sebagai instansi perencanaan daerah			2. Buku Agenda				
- Inspektorat Kabupaten Banjar selaku instansi pengawasan			3. Komputer				



Gambar 3. 2 SOP Pengumpulan Data Kinerja

### 3. Membuat data kinerja yang memuat target triwulanan untuk mendukung capaian kinerja yang diharapkan;

- Telah dilaksanakan pada penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II dan triwulan III Tahun 2024
- Dokumentasi Kegiatan

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Kecamatan Gambut

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggungjawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	79	-	Nilai		5,130,370,514	Camat	
1.1	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepuasan dan Kinerja Intern (IKKI)	76	-	Nilai	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,769,264,514	Sekretaris Camat	
1.1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	20	Persen	1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,871,100	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	
a	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	16	4	Dokumen	1.1.a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,549,300	JF Perencana	
b	Tersedianya Dokumen RKASPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	-	Dokumen	1.1.b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	322,500	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	
c	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	-	Dokumen	1.1.c Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	499,800	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	
d	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	3	-	Laporan	1.1.d Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	499,800	JF Perencana	
e	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	1	Laporan	1.1.e Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	499,800	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	
f	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	1	Laporan	1.1.f Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	499,900	JF Perencana	
1.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	25	Persen	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,279,902,172	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	

Gambar 3. 3 Tabel Pada Laporan Kinerja Triwulan II yang memuat target kinerja

Tabel 1.  
Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Kecamatan Gambut

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggungjawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	79	-	Nilai	1		5,130,370,514	Camat
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	76	-	Nilai	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,769,264,514	Sekretaris Camat
3	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	25	Persen	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	800,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	25	Persen		Administrasi Umum Perangkat Daerah	152,881,300	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	2	Paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,499,500	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	-	Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,398,000	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	2	Paket		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,979,500	
	Tersedianya Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	1	Paket		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,000,000	

Gambar 3. 4 Tabel Pada Laporan Kinerja Triwulan III yang memuat target kinerja

4. Melakukan pemantauan capaian kinerja sampai pada jenjang operasional staf/pelaksana;
  - Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi per triwulan untuk Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan sampai triwulan III
  - Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3. 5 Rapat Evaluasi Internal Triwulan I





Gambar 3. 6 Rapat Evaluasi Internal Triwulan II



Gambar 3. 7 Rapat Evaluasi Internal Triwulan III

5. Menyusun LKJiP secara lengkap dengan menyajikan informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan, memuat dan menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja outcome/output penting, menyajikan data perbandingan yang lengkap serta menyajikan data kinerja yang andal;
  - Akan dilakukan perbaikan penyusunan LKJiP Tahun 2024
  - Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3. 8 Rapat Penyampaian akan dilakukan perbaikan LkjIP Tahun 2024

Notulen Rapat	
Hari/Tanggal	: Selasa, 24 September 2024
Waktu rapat	: Pukul 11.00 WITA - Selesai
Acara	: Rapat Tindaklanjuti Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024
Hasil Kegiatan:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat dibuka oleh Sekretaris Camat, beliau menyampaikan tujuan rapat hari ini adalah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat terkait Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024. Hasil AKIP Tahun 2024 dari segi nilai meningkat dari tahun sebelumnya, Dimana pada Tahun 2023 nilai AKIP Kecamatan Gambut yaitu 50,78 dengan Predikat CC dan untuk Tahun 2024 memperoleh nilai 79,56 dengan predikat BB.</li> <li>Tanggapan Sekretaris Camat atas rekomendasi dari Inspektorat terkait evaluasi AKIP Tahun 2024 yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar membuat rencana aksi sesuai rekomendasi dari Inspektorat dengan menggambarkan perencanaan rencana aksi hingga level staff/pelaksana</li> <li>- Memperbarui SOP Pengukuran Kinerja yang memuat mekanisme pengukuran kinerja yang jelas</li> <li>- Melampirkan Laporan Kinerja Triwulanan yang telah didampingi oleh Bagian Organisasi dalam penyusunannya.</li> <li>- Melampirkan Notulen Rapat Monev setiap Triwulan sebelum penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>- Menyusun LKJIP Tahun 2024 agar memperhatikan rekomendasi dari Inspektorat di Evaluasi AKIP Tahun 2024</li> <li>- Lampirkan notulen dan dokumentasi rapat hari ini untuk membuktikan telah melaksanakan Rapat Internal untuk Menindaklanjuti Evaluasi AKIP Tahun 2024.</li> </ul> </li> <li>Tanggapan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Aksi Tahun 2025 akan kami sesuaikan dengan rekomendasi dari Inspektorat</li> <li>- Terkait SOP Pengukuran Kinerja akan disiapkan draftnya pada akhir tahun 2024</li> <li>- Laporan Kinerja Triwulan II dan III telah disusun dan didampingi Bagian Organisasi</li> <li>- Terkait melampirkan Notulen Rapat Monev setiap Triwulan sebelum penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan akan disiapkan dokumennya</li> <li>- Untuk penyusunan LKJIP akan menyesuaikan rekomendasi dari Inspektorat</li> <li>- Menyiapkan notulen rapat ini sebagai bukti tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP Tahun 2024.</li> </ul> </li> <li><b>Penutup.</b> Sekretaris Camat menutup rapat dengan mengucapkan terimakasih kepada peserta rapat dan mengingatkan pentingnya Kerjasama dan koordinasi dalam penyusunan mencapai Nilai AKIP yang baik dan berkualitas</li> </ol>	

Notulen,

  
Erry S. Si

Gambar 3. 9 Notulen Rapat akan dilakukan perbaikan LkjIP Tahun 2024

- Melaksanakan evaluasi internal secara berkala dan mendalam serta melaksanakan pembahasan dengan pihak yang berkepentingan serta memuat kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi. Kesepakatan tersebut secara formal menjelaskan tentang siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti;
  - Telah dilaksanakan evaluasi internal

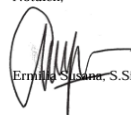
## - Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3. 10 Rapat evaluasi internal menindaklanjuti LHE AKIP Tahun 2024

Notulen Rapat	
Hari/Tanggal	: Selasa, 24 September 2024
Waktu rapat	: Pukul 11.00 WITA - Selesai
Acara	: Rapat Tindaklanjuti Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024
Hasil Kegiatan:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat dibuka oleh Seretaris Camat, beliau menyampaikan tujuan rapat hari ini adalah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat terkait Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024. Hasil AKIP Tahun 2024 dari segi nilai meningkat dari tahun sebelumnya, Dimana pada Tahun 2023 nilai AKIP Kecamatan Gambut yaitu 50,78 dengan Predikat CC dan untuk Tahun 2024 memperoleh nilai 79,56 dengan predikat BB.</li> <li>Tanggapan Sekretaris Camat atas rekomendasi dari Inspektorat terkait evaluasi AKIP Tahun 2024 yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar membuat rencana aksi sesuai rekomendasi dari Inspektorat dengan menggambarkan perencanaan rencana aksi hingga level staf/pelaksana</li> <li>- Memperbarui SOP Pengukuran Kinerja yang memuat mekanisme pengukuran kinerja yang jelas</li> <li>- Melampirkan Laporan Kinerja Triwulanan yang telah didampingi oleh Bagian Organisasi dalam penyusunannya.</li> <li>- Melampirkan Notulen Rapat Movev setiap Triwulan sebelum penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>- Menyusun LKJIP Tahun 2024 agar memperhatikan rekomendasi dari Inspektorat di Evaluasi AKIP Tahun 2024</li> <li>- Lampirkan notulen dan dokumentasi rapat hari ini untuk membuktikan telah melaksanakan Rapat Internal untuk Menindaklanjuti Evaluasi AKIP Tahun 2024.</li> </ul> </li> <li>Tanggapan Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Aksi Tahun 2025 akan kami sesuaikan dengan rekomendasi dari Inspektorat</li> <li>- Terkait SOP Pengukuran Kinerja akan disiapkan draftnya pada akhir tahun 2024</li> <li>- Laporan Kinerja Triwulan II dan III telah disusun dan didampingi Bagian Organisasi</li> <li>- Terkait melampirkan Notulen Rapat Movev setiap Triwulan sebelum penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan akan disiapkan dokumennya</li> <li>- Untuk penyusunan LKJIP akan menyesuaikan rekomendasi dari Inspektorat</li> <li>- Menyiapkan notulen rapat ini sebagai bukti tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP Tahun 2024.</li> </ul> </li> <li><b>Penutup.</b> Sekretaris Camat menutup rapat dengan mengucapkan terimakasih kepada peserta rapat dan mengingatkan pentingnya Kerjasama dan koordinasi dalam penyusunan mencapai Nilai AKIP yang baik dan berkualitas</li> </ol>	

Notulen,

  
Ermida Susana, S.Si

Gambar 3. 11 Notulen Rapat evaluasi internal menindaklanjuti LHE AKIP Tahun 2024

## B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Gambut tahun 2024 adalah sebesar Rp 5,168,250,292,- dengan realisasi anggaran Rp. 4,602,250,582 ,- (89,05%) dengan rincian untuk Belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp.



5.138.274.392,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 4.573.150.582,- (89,00%) dan Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. 29.976.000,- dengan realisasi sebesar Rp 29.100.000,- (97,08%).

Tabel 3. 7 Realisasi Jenis Belanja

NO	BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	BELANJA OPERASI	5,138,274,392	4,573,150,582	89.00
	a. BELANJA PEGAWAI	4,306,702,172	3,769,299,665	87.52
	b. BELANJA BARANG DAN JASA	831,572,220	803,850,917	96.67
	c. BELANJA HIBAH	-	-	-
2	BELANJA MODAL	29,976,000	29,100,000	97.08

Adapun untuk realiasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3. 8 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Gambut

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	<b>KECAMATAN GAMBUT</b>	<b>5,168,250,292</b>	<b>4,602,250,582</b>	<b>89.05</b>
1	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4,812,447,292</b>	<b>4,256,891,782</b>	<b>88.46</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3,871,000</b>	<b>3,658,100</b>	<b>94.50</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,549,300	1,534,800	99.06
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	322,500	320,000	99.22
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	499,800	406,100	81.25
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	499,800	441,000	88.24
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	499,800	475,200	95.08
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	499,800	481,000	96.24
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4,286,062,172</b>	<b>3,748,659,665</b>	<b>87.46</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,236,582,172	3,699,859,665	87.33
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49,120,000	48,440,000	98.62
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	360,000	360,000	100.00
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>21,000,000</b>	<b>21,000,000</b>	<b>100.00</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21,000,000	21,000,000	100.00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>800,000</b>	<b>790,000</b>	<b>98.75</b>
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	800,000	790,000	100.00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>200,648,000</b>	<b>195,977,726</b>	<b>97.67</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,499,500	1,042,500	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	586,000	480,000	81.91

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,979,500	1,646,000	83.15
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,000,000	23,412,500	100.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,643,000	4,278,700	75.82
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,995,000	1,875,000	93.98
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156,745,000	156,043,026	99.55
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7,200,000	7,200,000	100.00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>29,976,000</b>	<b>29,100,000</b>	<b>97.08</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,976,000	29,100,000	97.08
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>180,232,320</b>	<b>173,477,141</b>	<b>96.25</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	2,000,000	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,237,320	25,465,005	84.22
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147,995,000	146,012,136	98.66
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>89,857,800</b>	<b>84,229,150</b>	<b>93.74</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61,880,000	57,536,650	92.98
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,978,000	12,069,500	93.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14,999,800	14,623,000	97.49
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>64,594,000</b>	<b>60,510,000</b>	<b>93.68</b>
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>64,594,000</b>	<b>60,510,000</b>	<b>93.68</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64,594,000	60,510,000	93.68
<b>3</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>63,364,000</b>	<b>62,102,800</b>	<b>98.01</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>63,364,000</b>	<b>62,102,800</b>	<b>98.01</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9,264,000	8,990,000	100.00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	54,100,000	53,112,800	98.18
<b>4</b>	<b>Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>27,583,000</b>	<b>27,309,000</b>	<b>99.01</b>
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>23,296,000</b>	<b>23,189,000</b>	<b>99.54</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19,994,000	19,992,000	99.99
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3,302,000	3,197,000	96.82
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>4,287,000</b>	<b>4,120,000</b>	<b>96.10</b>
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4,287,000	4,120,000	96.10
<b>5</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>182,320,000</b>	<b>177,957,000</b>	<b>97.61</b>

	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>182,320,000</b>	<b>177,957,000</b>	<b>97.61</b>
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75,295,000	74,217,000	98.57
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	82,185,000	78,900,000	96.00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24,840,000	24,840,000	100.00
<b>6</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>17,942,000</b>	<b>17,480,000</b>	<b>97.43</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>17,942,000</b>	<b>17,480,000</b>	<b>97.43</b>
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2,217,000	2,105,000	100.00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3,267,000	3,265,000	99.94
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,162,000	3,090,000	97.72
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3,792,000	3,790,000	99.95
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2,182,000	1,960,000	89.83
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3,322,000	3,270,000	98.43

Sumber : Laporan Realiasi Anggaran Aplikasi SIPD SILANGKAR Kecamatan Gambut Tahun 2024

Penjelasan Tabel 3.8 sebagai berikut:

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang merupakan Sasaran Utama Kecamatan Gambut Tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi dengan target 79 dapat terealisasi 96,67 dengan nilai capaian 122,37% yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp 5.168.250.292,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.602.250.582,- dengan Persentase capaian 89,05%.

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.812.447.292,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.256.891.782,- dan Persentase capaian 88,46%. Program ini didukung dengan 8 (delapan) kegiatan yaitu :

##### 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.871.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.658.100,- dan Persentase capaian 94,50%. Dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.549.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.534.800 dan persentase capaian 99,06%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu anggaran Rp 322.500,- dan realisasi sebesar Rp 320.000,- dan persentase capaian 99,22%
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 499.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 406.100,- dan Persentase capaian 81,25%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 499.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 441.000,- dan Persentase capaian 88,24%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 449.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 475.200,- dan Persentase capaian 95,08%.
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 499.800,- dan realiasi Rp 481.000,- dan persentase capaian 96,24%.

## **1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Pagu anggaran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 4.286.062.172,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.748.659.665,- dan Persentase capaian 87,46%. Dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.236.582.172,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.699.859.665,- dan Persentase capaian 87,33%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.120.000,-

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.440.000,- dan Persentase capaian 98,62%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 360.000,- dan terealisasi Rp 360.000,- dan persentase capaian sebesar 100%.

### **1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Pagu anggaran kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp. 21.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.000.000,- dan Persentase capaian 100%. Dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.000.000,- dan Persentase capaian 100%.

### **1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Pagu anggaran kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar sebesar Rp. 790.000,- (98,75%) dan Persentase capaian 100%. Dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 790.000,- dan Persentase capaian 98,75%.

### **1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Pagu anggaran kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 200.648.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 195.977.726,- dan Persentase capaian 97,67%. Dengan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.499.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.042.500,- dan Persentase capaian 69,52%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 586.000,- telah terealisasi sebesar Rp 480.000 dan persentase capaian 81,91%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.979.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.646.500,- dan Persentase capaian 83,15%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.412.500,- dan Persentase capaian 93,65%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran Rp 5.643.000,- telah terealisasi Rp 4.278.700,- dan persentase capaian 75,82%.
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran Rp 1.995.000,- telah terealisasi Rp 1.875.000,- dan persentase capaian 93,98%.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 156.745.000,- telah terealisasi Rp 156.043.026,- dan persentase capaian 99,55%.
- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan pagu anggaran Rp 7.200.000,- dan terealisasi Rp 7.200.000,- dan persentase capaian 100%.

#### **1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Pagu anggaran kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 29.976.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.100.000,- dan Persentase capaian 97,08%. Dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.976.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.100.000,- dan Persentase capaian 97,08%.

#### **1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pagu anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.180.232.320,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 173.477.141,- dan Persentase capaian 96,25%. Dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.000.000,- dan Persentase capaian 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp30.237.320,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.465.005,- dan Persentase capaian 84,22%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 147.995.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 146.012.136,- dan Persentase capaian 98,66%.

#### **1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pagu anggaran kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 89.857.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 84.229.150,- dan Persentase capaian 93,74%.

Dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 61.880.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 57.536.650,- dan Persentase capaian 92,98%.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.978.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.069.500,- dan Persentase capaian 93%.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.999.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.623.000,- dan Persentase capaian 97,49%.

### **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Pagu anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 64.594.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.510.000,- dan Persentase capaian 93,68%. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

#### **2.1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kepada Camat**



Pagu anggaran kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kepada Camat sebesar Rp. 64.594.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.510.000,- dan Persentase capaian 93,68%. Dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 64.594.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.510.000,- dan Persentase capaian 93,68%.

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Pagu anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp. 63.364.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 62.102.800,- dan Persentase capaian 98,01%. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

#### **3.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp. 63.364.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 62.102.800,- dan Persentase capaian 98,01. Dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.264.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.990.000,- dan Persentase capaian 97,04%.
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 54.100.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.112.800,- dan Persentase capaian 98,18%.

### **4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Pagu anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 27.583.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 27.309.000,- dan Persentase capaian 99,01%. Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :



#### **4.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 23.296.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 23.189.000,- dan Persentase capaian 99,54%. Dengan 2(dua)sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran Rp 19.994.000,- telah terealisasi Rp 19.992.000,- dan persentase capaian 99,99%.
- Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar 3.302.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.197.000,- dan Persentase capaian 96,82%.

#### **1.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar Rp 4.287.000,- dengan realisasi keuangan Rp 4.120.000,- dan persentase capaian 96,10%.

### **5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Pagu anggaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 182.320.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 177.957.000,- dan Persentase capaian 97,61%. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

#### **5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

Pagu anggaran kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar Rp 182.320.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 177.957.000,- dan Persentase capaian 97,61%. Dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 75.295.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 74.217.000,- dan Persentase capaian 98,57%.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 82.185.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.900.000,- dan Persentase capaian 96,00%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.840.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.840.000,- dan Persentase capaian 100%.

## **6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**

Pagu anggaran Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa sebesar Rp. 17.942.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.480.000,- dan Persentase capaian 97,43%. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

### **6.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Pagu anggaran kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 17.942.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.480.000,- dan Persentase capaian 97,43%. Dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.217.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.105.000,- dan Persentase capaian 94,95%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.267.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.265.000,- dan Persentase capaian 99,94%.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.162.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.090.000,- dan Persentase capaian 97,72%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.792.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.790.000,- dan Persentase capaian 99,95%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.182.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.960.000,- dan Persentase capaian 89,83%.
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.322.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.270.000,- dan Persentase capaian 98,43%.

Tabel 3. 9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	79	96.67	122.37	5,168,250,292	4,602,250,582	89.05
1	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	76	88.07	115.88	4,812,447,292	4,256,891,782	88.46
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100	100	100.00	3,871,000	3,658,100	94.50
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	16	100.00	1,549,300	1,534,800	99.06
1.1.2	Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100.00	322,500	320,000	99.22
1.1.3	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100.00	499,800	406,100	81.25
1.1.4	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	3	100.00	499,800	441,000	88.24
1.1.5	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	100.00	499,800	475,200	95.08
1.1.6	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	100.00	499,800	481,000	96.24
1.2	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100.00	4,286,062,172	3,748,659,665	87.46
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	29	72.50	4,236,582,172	3,699,859,665	87.33
1.2.2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100.00	49,120,000	48,440,000	98.62
1.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100.00	360,000	360,000	100.00
1.3	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100.00	21,000,000	21,000,000	100.00

1.3.1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	100.00	21,000,000	21,000,000	100.00
1.3	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	100	100.00	800,000	790,000	98.75
1.3.1	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	100.00	800,000	790,000	100.00
1.4	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100.00	200,648,000	195,977,726	97.67
1.4.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	100.00	1,499,500	1,042,500	100.00
1.4.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	100.00	586,000	480,000	81.91
1.4.3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	5	100.00	1,979,500	1,646,000	83.15
1.4.4	Tersedianya Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	20	100.00	25,000,000	23,412,500	100.00
1.4.5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	10	100.00	5,643,000	4,278,700	75.82
1.4.6	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	100.00	1,995,000	1,875,000	93.98
1.4.7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100.00	156,745,000	156,043,026	99.55
1.4.8	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	100.00	7,200,000	7,200,000	100.00
1.5	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100.00	29,976,000	29,100,000	97.08
1.5.1	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	100.00	29,976,000	29,100,000	97.08
1.6	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100.00	180,232,320	173,477,141	96.25
1.6.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100.00	2,000,000	2,000,000	100.00
1.6.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100.00	30,237,320	25,465,005	84.22
1.6.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100.00	147,995,000	146,012,136	98.66
1.7	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100.00	89,857,800	84,229,150	93.74
1.7.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5	100.00	61,880,000	57,536,650	92.98

1.7.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	10	100.00	12,978,000	12,069,500	93.00
1.7.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	3	100.00	14,999,800	14,623,000	97.49
2	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	100	100.00	64,594,000	60,510,000	93.68
2.1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100.00	64,594,000	60,510,000	93.68
2.1.1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	6	100.00	64,594,000	60,510,000	93.68
3	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	100	100.00	63,364,000	62,102,800	98.01
3.1	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100	100	100.00	63,364,000	62,102,800	98.01
3.1.1	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	3	100.00	9,264,000	8,990,000	100.00
3.1.2	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100.00	54,100,000	53,112,800	98.18
4	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	100	100.00	27,583,000	27,309,000	99.01
4.1	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100.00	23,296,000	23,189,000	99.54
4.1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang terfasilitasi	2	2	100.00	19,994,000	19,992,000	99.99
4.1.2	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1	100.00	3,302,000	3,197,000	96.82
4.2	Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100.00	4,287,000	4,120,000	96.10
4.2.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1	100.00	4,287,000	4,120,000	96.10

5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100.00	182,320,000	177,957,000	97.61
5.1	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100	100	100.00	182,320,000	177,957,000	97.61
5.1.1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300	300	100.00	75,295,000	74,217,000	98.57
5.1.2	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	1	100.00	82,185,000	78,900,000	96.00
5.1.3	<b>Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</b>	<b>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</b>	1	1	100.00	24,840,000	24,840,000	100.00
6	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100.00	17,942,000	17,480,000	97.43
6.1	Terselenggaranya Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100.00	17,942,000	17,480,000	97.43
6.1.1	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	1	100.00	2,217,000	2,105,000	100.00
6.1.2	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	1	100.00	3,267,000	3,265,000	99.94
6.1.3	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	1	100.00	3,162,000	3,090,000	97.72
6.1.4	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	1	100.00	3,792,000	3,790,000	99.95
6.1.5	Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	1	100.00	2,182,000	1,960,000	89.83
6.1.6	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	1	100.00	3,322,000	3,270,000	98.43

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gambut Tahun 2024, merupakan bentuk pengawasan dan pertanggung jawaban pencapaian kinerja Tahun 2024, yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKJIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2024 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan Kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2024, sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan dengan target Tahun 2024 sebesar 79 dengan realisasi sebesar 96,67 dan perolehan capaian sebesar 122,37%, dengan predikat Sangat Tinggi. Pencapaian keberhasilan sasaran strategis ini di dukung oleh indikator program lain sebagai berikut:

1. Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI);
2. Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana;
3. Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
4. Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan;
5. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
6. Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

### **B. SARAN-SARAN**

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Pembahasan di tingkat yang lebih tinggi tentang program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di Kecamatan Gambut agar sinkron antara perencanaan dan keuangan agar adanya kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



2. Perlunya peningkatan wawasan dan pendampingan yang rutin oleh instansi mitra pemangku terhadap aparatur kecamatan khususnya dalam penyusunan Dokumen Perencanaan guna peningkatan nilai SAKIP.
3. Pelaksanaan Koordinasi yang lebih intens lagi baik itu pada internal kecamatan Gambut maupun dengan pihak diluar Kecamatan Gambut

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gambut ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Gambut berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2024 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Pencapaian target- target perencanaan pada tahun berikutnya.



Gambut, 30 Januari 2025  
Camat Gambut

Ahmad Fauzan, S.STP, M.Si.  
NIP. 19801125 200012 1 003

## LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja dan Cascading Tahun 2024  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/12dDrNrSeKL-wkJzb4hEbamoKtTXrvhaA/edit?usp=sharing&ouid=106668055401047879146&rt=pof=true&sd=true>
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Gambut Tahun 2024  
[https://drive.google.com/file/d/1CGa8vBckeB0m6L4bL-P6tciR\\_8kFznPR/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1CGa8vBckeB0m6L4bL-P6tciR_8kFznPR/view?usp=sharing)